

Musrenbang Lampung Utara Tahun 2021

Chandra Saputra - LAMPUNG.INDONESIASATU.CO.ID

Mar 30, 2021 - 10:23



Pemkab Lampung Utara, musrenbang tahun 2021

Lampung Utara- 30/03/2021, Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

Kegiatan dihadiri Gubernur Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung (Edi Yanto), Bupati Lampung Utara (Budi Utomo), Sekda Lampung (Lekok), Anggota DPRD Lampung Utara, Forkopimda Lampung Utara, Staf Ahli dan Asisten Pemerintah setempat, yang pelaksanaan

dilakukan pada ruang Tapis Pemkab Lampung Utara, Selasa (23/03/2021).

" Budi Utomo, saat sambutan mengatakan, kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu mengurangi luas wilayah, hingga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah.

" Karena keterbatasan tersebut, kami mengajak kepada semua pihak untuk selalu optimis bekerja keras, berkreatifitas dan berinovasi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera," ujar Bupati.

" Tambahnya, untuk sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan rapat teknis dan diskusi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung (Edi Yanto), menyatakan Musrenbang ini sebuah mekanisme penyusunan program pembangunan secara berjenjang dari atas ke bawah dan begitupun sebaliknya dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

" Ini terkesan sebagai kegiatan rutin, tapi saya tekankan bahwa setiap tahun ada yang menjadi prioritas pembangunan. Melalui Musrenbang ini yang akan menjadi langkah awalnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

" Lampung merupakan kabupaten tua yang sudah banyak melahirkan daerah otonomi baru. dulunya kabupaten ini merupakan daerah perkebunan dan pertanian sehingga ke depannya perlu ditopang kembali. Untuk itulah, Gubernur (Arinal Djunaidi) ingin menjadikan Lampung sebagai penghasil terbesar Lada Hitam, karenanya sektor pertanian di kabupaten Lampung menjadi salah satu fokus pembangunan.

Selain itu, sisi kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Data statistik mencatat ada 19,30 persen angka kemiskinan di Lampung tahun 2020. " nah ini harus kita kecilkan angkanya. kemudian juga angka harapan hidup juga harus semakin baik walaupun sekarang sudah mencapai 67,67 persen.

Harapannya, program pembangunan di Tahun 2022 bisa memperbaiki data statistik. Kemudian juga pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. semua ini akan bisa dicapai dengan program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan, ujar edi.

Sementara dalam laporannya, Sekda Lampung Drs. Lekok, M.,M., mengatakan, Pemkab Lampung telah melaksanakan semua tahap yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan (FORGAB) SKPD yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai pada Musrenbang Kabupaten.

Pada setiap tingkatan Musrenbang tersebut telah disampaikan pemaparan untuk mensinergikan program pembangunan dan program prioritas hasil Musrenbang Kecamatan. "Selanjutnya rumusan hasil Musrenbang ini akan menjadi pedoman

penyusunan rencana pembangunan dalam rancangan APBD Tahun 2022," ujar Sekda.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampura Andi Wijaya, S.,T., M.,M., mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan di kabupaten Lampura ini.

Salah satunya, ketergantungan terhadap sektor Pertanian yang masih tinggi.

Yang kedua yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, SDM masyarakat yang berkualitas dan berbudaya juga menjadi isu strategis pembangunan, tak kalah penting juga terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

"Lanjut Andi, terkait tata kelola pemerintah kami sudah berkoordinasi dengan provinsi. soal pelayanan publik juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman terkait dengan hal lainnya juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. juga dampak Pandemi Covid-19 menjadi isu pembangunan di kabupaten Lampura," pungkasnya. (***)